

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

Mengacu pada Pasal 349 Permendagri 86 Tahun 2017, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Kaidah Pelaksanaan
- 6.2. Kesimpulan

- h. Pemenuhan alat kesehatan untuk Puskesmas rawat inap yang belum tersedia.
- i. Belum tercukupinya sarana dan prasarana penunjang untuk Puskesmas Rawat Inap.
- C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Terkendala dengan proses pengadaan yang lambat dikarenakan adanya aturan atau edaran untuk melakukan proses pengadaan secara transaksional sedangkan ASN yang ada di Kabupaten Balangan belum secara penuh memahami proses pengadaan secara transaksional sehingga memperlambat proses pelaksanaan fisiknya.
- D. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Terbatasnya Ruang Perawatan Pasien Covid- 19 di RSUD
 - b. Belum tersedianya ruangan isoter khusus secara permanen
 - c. Anggaran tidak mencukupi
 - d. Belum tersedianya tim rescue cepat di tingkat kecamatan yang sudah terlatih dan bersertifikat
- A. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Kurangnya Sarana Prasarana (Mobil Operasional) yang tidak seimbang dengan jumlah anggota dan jumlah kegiatan operasional sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berlangsung secara maksimal dan realisasi pada akhirnya tidak berjalan sesuai target yang di harapkan
- B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Kurangnya anggaran kegiatan sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan
 - b. Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap ormas keagamaan dan kelompok masyarakat
 - c. Masih minimnya laporan situasi daerah yang disampaikan oleh mitra kerja lintas sector
 - d. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman terhadap tupoksi
 - e. Kurang kooperatifnya pengurus parpol dan ormas
- C. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Masih adanya keterlambatan data penerima manfaat dari pihak kecamatan yang diserahkan sehingga belum dapat terealisasi,
 - b. Keterlambatan dalam penyampaian permohonan proposal,
 - c. Belum tersedianya rumah singgah,